



## Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL & DIPA TA 2024-2025 serta Penataan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga

**Jakarta, 23 Oktober 2024** – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu, 23 Oktober 2024 melaksanakan Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 – 2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L, yang dilaksanakan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Kementerian dan Lembaga serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk gerak cepat penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru, sesuai dengan Kabinet Merah Putih.

“Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting,” jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Dalam arahannya, Menteri Keuangan juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama Pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan *resources* atau sumber daya di internal K/L.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN), akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang *idle*.

Sebagai penutup, Menteri Keuangan menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan *resources* anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

### Narahubung Media:

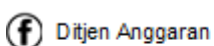
Robi Toni  
Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan



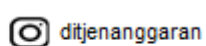
081310004134



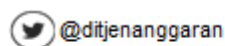
[kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)



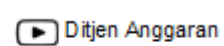
Ditjen Anggaran



ditjenanggaran



@ditjenanggaran



Ditjen Anggaran